

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SAKSI  
SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN**

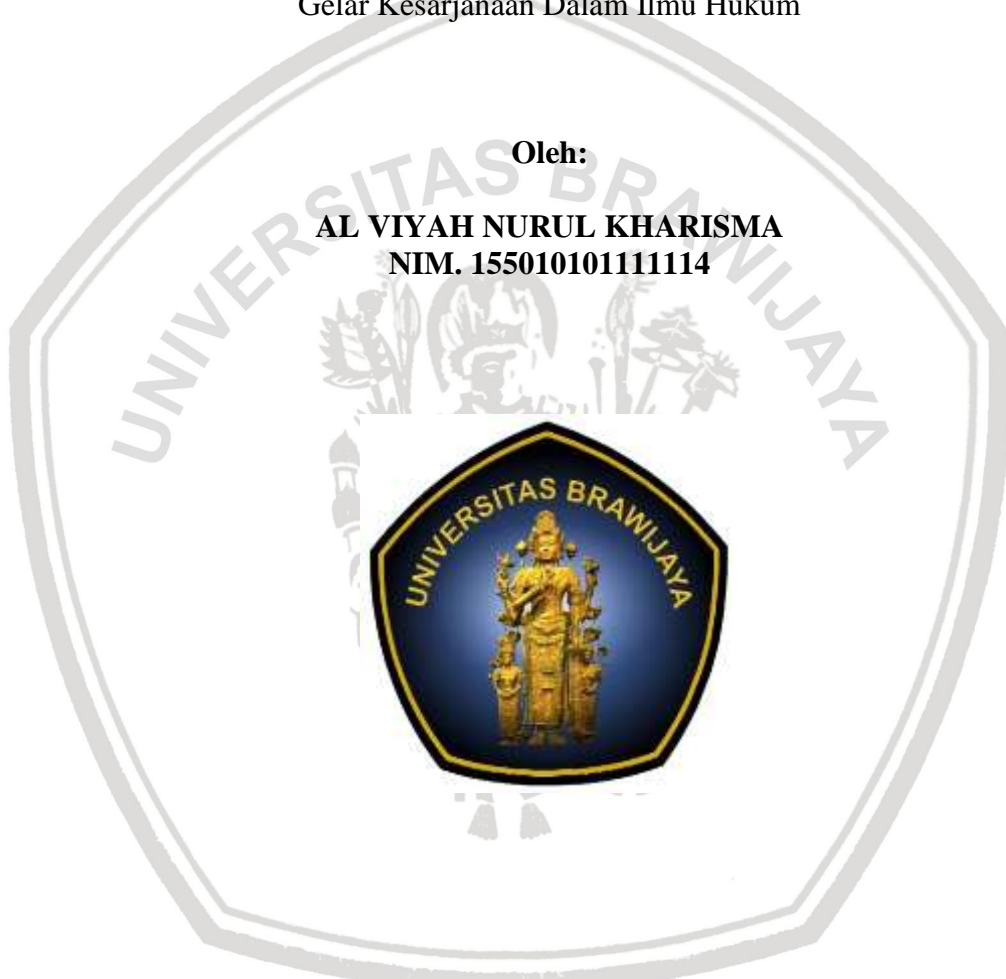
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**AL VIYAH NURUL KHARISMA  
NIM. 155010101111114**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SAKSI  
SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011)

Oleh :

**Al Viyah Nurul Kharisma**

**155010101111114**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.  
NIP. 19760429 20021 2 2001

Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 19860 1 2001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.  
NIP. 19660710 19920 3 2003

Dr. Rachmad Safa'at.S.H.,M.Si.  
NIP. 19620805 19880 2 1001

## PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 917/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AL VIYAH NURUL KHARISMA  
NIM : 155010101111114  
Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SAKSI SEBAGAI  
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Desember 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah dan KaruniaNya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu mengingat umatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penelitian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa doa, bimbingan, semangat, motivasi, dan masukan maupun kritik yang membangun. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Yulianti, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, motivasi dan kesabarannya yang luar biasa untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, motivasi dan kesabarannya yang luar biasa untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. *My Support system*, Mama Supari, S.H. yang selalu dengan sabar mendengarkan cerita juga keluh kesah dan selalu berpesan untuk tidak menganggap ini sebagai beban serta memberikan semangat kepada penulis agar bisa tetap tenang dan terus fokus mengerjakan kewajiban, yaitu menyelesaikan skripsinya. Bapak Al Amin yang juga selalu memberikan pesan nasihat membangun dan selalu menguatkan penulis. Indah Alvionita Sari, adik penulis yang turut memberikan dorongan semangat dan hiburan agar penulis tidak terlalu memikirkan skripsi secara berlebihan. Merekalah yang selalu turut mendoakan dan memberikan dukungan setiap saat tanpa penulis minta;

6. Bude Suminah, yang penulis panggil dengan sebutan dede, yang juga selalu mendoakan penulis. Terimakasih juga untuk setiap pesan poitif dan semangat untuk penulis.;
7. Teman – teman peneliti sejak mahasiswa baru maupun yang baru akrab setelah beberapa semester dilalui, Youri, Novia A, Ratih, Dwi E, Niken, Nur Persma a.k.a Isma, yang memberikan semangat, memberikan masukan serta kritik membangun dalam penelitian ini, menjadi teman main, dan selalu membantu penulis selama masa kuliah;
8. Teman – teman penulis sejak menempuh sekolah menengah atas, yang juga sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang, Devy, Resty, Ninda, Agil, Khorin, Wahyu, yang selalu menerima segala curahan hati penulis serta meluangkan waktu untuk sekedar mencari hiburan saat penulis merasa penat;
9. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH FH UB) yang telah memberikan banyak ilmu terutama tentang penulisan dan diskusi, menjadi keluarga kedua saat penulis baru merasakan jauh dari keluarga yang sesungguhnya karena harus menempuh pendidikan diluar kota penulis berasal,serta memberikan pengalaman yang belum pernah dialami oleh penulis;
10. Badan Pengurus Harian FKPH FH UB 2017 “Sahabat Kreatif”, Mbak Wahid, Mas Munir, Mas Fazal, Mbak Uca, Dina, Zakia, Ismi, Melta, Faizal, Lesmana, Irvan, Panji, Roziq yang telah memberikan kesempatan penulis dapat berproses dalam suatu organisasi dan penulis juga memohon maaf karena saat memegang amanah itu penulis sadar tidak optimal;
11. Kelompok 5 KKN FH UB periode Januari 2018, Elvira, Tamara, Shilda, Novika, Mbak Illa, Anisa, Mimi, Friska, Rafika, Misbah, Tio, Mas Enok, Mas Jeremy, Adit, Asroful, Harby, Mas Noval, Mas Fahmi yang memberikan warna baru serta kenangan yang tak terlupakan dimasa semester akhir kuliah yang sangat berkesan;



12. Rekan – rekan senior yang juga banyak membantu membantu saat penulis tidak tahu dan merasa bingung. Mbak Illa, Mbak Ani, Mas Aan, Terimakasih atas segala bantuan dan untuk semua diskusi yang memberi pandangan baru atas banyak hal yang tidak diketahui penulis sebelumnya;
13. Teman – teman konsentrasi Hukum Pidana “HIMAKOPI” 2015 yang banyak baru bertemu dan diperkenalkan secara tidak sengaja selama proses mengajukan skripsi di lantai 4 gedung A, tempat bersejarah bagi kita semua;
14. Teman – teman seperjuangan FH UB 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan semangatnya; dan
15. Pihak – pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masih diperlukan masukan agar penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama dibidang Hukum Acara Pidana terlebih khusus lagi Hukum Anak. Semoga apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dan lindungan Allah SWT.

Malang, 30 November 2018

Al Viyah Nurul Kharisma

## RINGKASAN

Al Viyah Nurul Kharisma, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Kata kunci : anak saksi, alat bukti petunjuk

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh anak saksi sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 yang dalam putusannya hakim menganggap keterangan yang diberikan oleh anak saksi adalah bukan termasuk alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti ? dan Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 telah memberikan perlindungan hukum kepada anak saksi/korban dalam sistem peradilan pidana ?

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 adalah hakim menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti karena hakim menganggap anak tersebut masih dibawah umur sehingga keterangan yang diberikan harus dikesampingkan dan dalam putusan tersebut juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak saksi/korban.

## SUMMARY

Al Viyah Nurul Kharisma, *Criminal Law*, Faculty Of Law University Of Brawijaya, November 2018, **THE POWER OF PROOF OF WITNESS CHILD INFORMATION AS EVIDENCE IN COURT** (A study of the Supreme Court Judicial Decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Keywords : witness child, clue as an evidence

In this research, the author's concern is about the power of proof of witness child information as evidence in court. The problem is motivated by the Supreme Court judicial decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011 which in its judicial decision, the judge considers that the information given by the witness child is not included as evidence.

Based on that problem, the formulation of the questions in this thesis are what is the judge's legal considerations in the Supreme Court judicial decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011 which in that judicial decision the information given by the witness child is not as an evidence ? and Is the Supreme Court judicial decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011 has gave legal protection to witness child / victim child in the criminal justice system?

To answer the questions, this normative legal research uses statute approach and case approach. The legal materials used in this thesis are primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials that have been obtained and then analyzed using systematic interpretation methode, so it can answer the legal problems that has been formulated as questions in this thesis.

Based on research, the first result is the judge's legal considerations in the Supreme Court judicial decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011 which in that judicial decision the information given by the witness child is not as an evidence because the judge considers that the witness child is still underage, so the information given by the child witness must be excluded. The second result is the Supreme Court judicial decision Number 1469 K / Pid. Sus / 2011 does not give legal protection to the child witness / child victim.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas (plagiasi).....	iii
Ucapan Terimakasih .....	iv
Ringkasan.....	vii
<i>Summary</i> .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Anak.....	23
B. Kajian Umum Tentang Macam – Macam Alat Bukti.....	25
C. Kajian Umum Tentang Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan.....	31
D. Kajian Umum Tentang Teori Pembuktian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
1. Pendekatan Perundang – undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	36
2. Pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ).....	37

C. Jenis Bahan Hukum.....	37
1. Bahan Hukum Primer.....	37
2. Bahan Hukum Sekunder.....	38
3. Bahan Hukum Tersier.....	39
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
F. Definisi Konseptual.....	41

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.....	43
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 Yang Menganggap Keterangan Anak Saksi Bukan Merupakan Alat Bukti.....	44
C. Perlindungan Hukum Kepada Anak Saksi/Korban Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....	17
--------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ketetapan Pembimbing
Lampiran 2	Kartu Bimbingan
Lampiran 3	Surat Bebas Plagiasi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Lampiran 4	Surat Pernyataan
Lampiran 5	Jurnal



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi dasar Negara Indonesia mengatur dengan jelas hak – hak warga negaranya.<sup>1</sup> Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang diamanatkan dalam alenia ke empat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yaitu “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Selain itu diatur pula dengan jelas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.<sup>2</sup>

Mendapatkan perlindungan adalah hak setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga dapat diartikan bahwa hak mendapatkan perlindungan juga diberikan kepada warga Negara yang belum dewasa atau masih anak - anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, dan atas dasar itulah kesejahteraan anak perlu diperhatikan. Konstitusi juga telah mengatur mengenai kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Isrok, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012, hlm 148.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang tentang Mahkamah Konstitusi**, Kepanitiaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015, hlm 3.



“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan atas Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut diatas, anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk juga anak berhak atas perlindungan secara hukum. Peraturan perundang – undangan lainnya mengenai anak yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) lahir sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap nasib, harkat, serta martabat anak. Namun adanya ketentuan – ketentuan tersebut tidak secara otomatis melindungi anak dari berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Sehingga masih dapat ditemukan terjadi tindak pidana terhadap anak, tidak terkecuali tindak pidana penganiayaan terhadap anak, seperti yang terdapat dalam kasus putusan Mahkamah Agung yang diteliti oleh penulis.

Perlindungan terhadap setiap warga negara yang dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tak terlepas dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai atau menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat serta melakukan suatu tindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pelanggaran hukum adalah tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Lyberty, Yogyakarta, 2008, hlm 41.

Berkaitan dengan hak tersebut maka dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tetap berlaku sanksi berupa pidana bagi para pelakunya. Hal ini karena dalam hukum pidana mengatur bahwa siapa saja yang terbukti telah melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi hukuman atau sanksi yang juga disebut dengan pidana itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam hal ini, hukum pidana memiliki fungsi yaitu sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan juga sebagai sarana untuk mengatur kontrol sosial yang dilakukan oleh negara dengan alat perlengkapannya.<sup>5</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan. Hadirnya lembaga peradilan merupakan suatu syarat mutlak bagi suatu Negara Hukum, dan Indonesia merupakan Negara hukum. Lembaga peradilan dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum yang ada serta undang – undang dalam suatu Negara. Pelaksanaan hukum pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana yaitu adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar benarnya.

Upaya mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dapat menerapkan ketentuan dari hukum acara pidana. Terdapat beberapa alur atau proses dalam persidangan yang harus dilalui. Salah satunya adalah tahap pembuktian. Tahap pembuktian sangat berperan dalam menentukan dan

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 2.

<sup>5</sup> Tongat, **Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm 21.

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dapat diketahui seseorang terbukti sah juga meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana atau tidak. Jika terbukti bersalah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan putusan hakim.

Adanya alat bukti sangat menentukan proses pembuktian. Alat bukti ketentuannya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>6</sup> Mengenai alat bukti yang dinyatakan dalam pasal tersebut, keterangan saksi dalam pembuktian adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sangat penting. Saksi yaitu seorang yang ia dapat memberikan keterangannya untuk kepentingan pada saat penyidikan, penuntutan dan juga peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri serta ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut dengan PMK No. 65/PUU-VIII/2010), memperluas makna saksi, bahwa yang disebut saksi adalah bukan lagi hanya orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri, tapi juga semua orang yang dapat memberikan kesaksiannya yang mengetahui mengenai perkara yang bersangkutan termasuk juga saksi *testimonium de auditu*, yaitu saksi yang mendengar dari orang lain.<sup>7</sup>

Perkembangan penegakan hukum Indonesia sekarang ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Peristiwa hukum juga berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan dan peradaban manusia. Terkait dengan keterangan saksi dalam acara pembuktian di

---

<sup>6</sup> Redaksi Sinar Grafika, **KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 271.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

pengadilan, jika orang yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan telah sesuai dan memenuhi syarat untuk sahnya suatu keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur berdasarkan undang – undang, maka hal ini tentunya tidak menimbulkan masalah dalam pembuktian perkara pidana.

Akan tetapi, ada kalanya bahwa suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak. Mengingat anak adalah subyek yang tidak cakap hukum. Menjadi kendala apabila dalam pembuktian tindak pidana dipersidangan adalah ketika anak tanpa sumpah menjadi seorang saksi dalam suatu tindak pidana serta tidak dapat dihadapkannya saksi lain yang disumpah untuk menguatkan keterangan yang diberikan anak. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana kekuatan pembuktian atas keterangan yang diberikan oleh seorang anak terhadap suatu tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti, hingga menimbulkan suatu keyakinan hakim secara sah dan patut untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak tersebut, hal ini berguna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan.

Mengenai anak yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, Pasal 171 huruf a KUHAP menyatakan bahwa seorang anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan juga belum kawin, Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh sebab itu menurut KUHAP dalam penjelasan pasal 171 huruf a KUHAP tersebut, keterangan yang

diberikan anak tidak memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dapat dipahami bahwa keterangan seorang saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak termasuk alat bukti namun bila keterangan yang diberikan oleh saksi meskipun ia tidak disumpah sesuai dengan keterangan dari seorang saksi yang telah disumpah, maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Ada beberapa hal yang menurut penulis perlu dicermati. Rumusan Pasal 171 huruf a KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian, karena bila kedua pasal tersebut dikaitkan, Pasal 171 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa anak dapat memberikan keterangannya tanpa disumpah dan keterangannya dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk, namun dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa jika keterangan saksi yang tidak disumpah memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah lainnya, maka bisa menjadi tambahan untuk alat bukti sah lainnya, dalam hal ini, alat bukti sah yang lain dapat diartikan bukan hanya petunjuk saja. Sehingga menurut penulis terjadi kekaburan norma yang mengakibatkan ketidak pastian hukum. Hal tersebut membuat para aparat dan seluruh elemen yang terlibat dalam hukum dituntut untuk dapat bekerja dan berupaya lebih keras dalam mencari dan menegakkan keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum.



Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mengenai hak setiap warga Negara yaitu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum tidak terbatas hanya untuk orang dewasa saja. Hak setiap warga negara, yang telah diamanatkan dalam konstitusi dalam hal ini baru dapat dikatakan telah tercapai jika yang dimaksud setiap orang dimaknai dan diartikan setiap orang termasuk anak. Maka dalam hal terjadi tindak pidana yang melibatkan anak, anak sebagai saksi, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan anak sebagai korban, anak tetap memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak dibeda – bedakan didepan hukum atau *equality before the law*. Seperti pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 (selanjutnya disebut dengan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011), dimana terdapat salah satu saksi yang merupakan seorang anak yang juga sekaligus korban.

Kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini terjadi di Kota Tondano, Sulawesi Utara. Berdasarkan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 dijelaskan didalamnya bahwa pada putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 181/Pid.B/2010/PN.Tdo tanggal 27 Oktober 2010 seorang laki-laki yang bernama Moddij H. Teurah alias Modi pada 3 Februari 2010 telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Adapun yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan terhadap anak. Terdakwa adalah seorang pengasuh di panti Tuna Rungu Damai Tomohon, dan yang menjadi korban

dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Rizaldy Goni alias Rizal yang masih berusia 8 tahun.<sup>8</sup>

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula saat Rizal yang merupakan penghuni panti seperti biasanya dimandikan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai pengasuh panti, namun saat korban sementara sedang dimandikan, terdakwa merasa kesal karena korban Rizal sering bergerak sehingga terdakwa marah dan kemudian mencubit lengan kiri saksi korban alias Rizal hingga membuat saksi korban Rizal kesakitan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka memar kebiruan dilengan sebelah kiri berukuran 2 (dua) sentimeter berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 56/RM/VER/2010, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. F. Kasenda selaku dokter rumah sakit Bathesda Tomohon.<sup>9</sup>

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak sebelum perubahan), undang – undang tersebut saat ini telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pembuktian persidangan hingga keluar putusan hakim Pengadilan Negeri Tondano, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan penganiayaan kepada korban Rizal, pun putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 2.

Padahal, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang telah dilakukan dipersidangan, terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah, yaitu bukti surat visum dan keterangan saksi dari 4 teman teman di panti tuna rungu tersebut serta keterangan saksi dari Rizal yang juga sebagai anak korban sekaligus anak saksi.<sup>10</sup>

Berdasarkan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, dari beberapa dasar pertimbangan hakim, ada hal yang menurut penulis perlu dicermati yaitu mengenai bebasnya terdakwa. Terdakwa bebas karena berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa tidak terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rizal. Pada saat pemeriksaan, terdakwa juga tidak mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga kejadian tersebut hanyalah berdasarkan atas keterangan saksi korban saja dan tidak didukung dengan alat bukti lain termasuk alat bukti petunjuk. Dalam hal ini hakim menganggap keterangan saksi Rizal merupakan *testimonium de auditu*. Hal ini yang menyebabkan keterangan saksi Rizal dikesampingkan oleh hakim.<sup>11</sup>

Keterangan saksi *testimonium de auditu* merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi *testimonium de auditu* ini diakui sebagai salah satu alat bukti setelah adanya PMK No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dapat diberikan oleh seseorang yang diperlukan saat penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang tidak selalu ia mendengarnya sendiri,

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 9.

melihat sendiri, dan mengalaminya sendiri. Maka, berdasarkan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang dalam salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa keterangan saksi Rizal dikesampingkan karena keterangannya merupakan *testimonium de auditu* dalam hal ini hakim tidak memperhatikan adanya PMK No. 65/PUU-VIII/2010.

Selain itu, dalam putusan tersebut hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa yaitu empat orang saksi yang merupakan teman korban, sehingga satu satunya alat bukti yang ada pada saat itu hanyalah keterangan dari saksi korban Rizal sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Hakim menganggap keterangan korban hanya sebagai *testimonium de auditu* dan akhirnya keterangan dari saksi Rizal dikesampingkan oleh hakim, karena tidak didukung dengan adanya alat bukti yang lain. Padahal saat itu telah ada PMK No. 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya saksi *testimonium de auditu* adalah juga diakui sebagai saksi.

Selain itu juga, terdakwa yang bebas karena kurangnya alat bukti, yaitu hanya ada satu orang saksi saja yang juga sekaligus saksi korban, sebenarnya telah ada peraturan yang mengatur bahwa satu alat bukti sudah dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4419 (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) karena kasus dalam putusan ini dapat digolongkan juga dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PKDRT memberikan pengertian mengenai yang dimaksud lingkup rumah tangga yaitu orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yaitu suami, isteri, dan anak karena adanya hubungan darah, perkawinan, persesuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi, terdakwa sebagai pengasuh korban dalam hal ini juga termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga dalam kejadian penganiayaan terhadap anak tersebut, dapat pula berlaku ketentuan dalam UU PKDRT.

Pasal 55 UU PKDRT juga menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan yang diperoleh dari satu orang saksi korban saja sudah cukup dapat membuktikan terdakwa bersalah, jika disertai juga dengan alat bukti yang sah lainnya. Sehingga dalam hal terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, keterangan seorang saksi saja dapat dianggap dan memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah jika disertai atau ditambah dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Selain PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, penulis menemukan dua putusan lainnya yang juga terdapat anak saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidananya, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2190

---

<sup>12</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.



K/Pid.Sus/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2015. Kedua putusan Mahkamah Agung ini memutuskan terdakwa pada masing – masing perkara diputus tidak bersalah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa Leonardo Siahaan, berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dengan sengaja telah melakukan keekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban Yusfika alis Fika, siswa SMK Sangkulirang yang sedang praktik magang PSG (Praktek Sistem Ganda) di Kantor Sahbandar Unit Pelabuhan Sangkulirang. Kejadian bermula saat Fika diajak oleh saksi Kristina, A.Md.Sek alias Tina kerumah terdakwa dengan maksud untuk bersih – bersih rumah di terdakwa.<sup>13</sup>

Lalu saat Fika datang kerumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Fika untuk menginjak – injak punggung terdakwa. Setelah itu saksi Fika masuk ke kamar terdakwa dan pintu ditutup lalu terdakwa berbaring diranjang. Setelah selesai menginjak – injak terdakwa, saksi Fika hendak keluar dari kamar, namun terdakwa langsung menghalang halangi. Terdakwa menarik saksi Fika dan langsung dibaringkan ditempat tidur, lalu dicium pipi, bibir, dan lehernya, terdakwa juga membuka pakaian dalam korban. Karena saksi Fika terus berontak, terdakwa melepaskan saksi Fika. Malamnya setelah kejadian itu, korban mengatakan pada teman terdakwa yaitu Sofiansyah alias Iyan di Kantor Sahbandar Sangkulirang bahwa korban telah dilakukan

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013, hlm. 2.

pencabulan oleh terdakwa dirumah terdakwa.<sup>14</sup> Fika dalam kasus ini adalah sebagai saksi korban dan juga anak saksi, walaupun tidak terdapat keterangan mengenai usia saksi Fika, namun dari keterangan bahwa ia adalah siswa SMK Sangkulirang yang sedang melakukan praktek magang, maka dapat diperkirakan usia Fika masih termasuk anak dan belum menikah.

Terdakwa diancam Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebelum perubahan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 177/Pid.Sus/2012/PN.SGT menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga dalam hal ini terdakwa bebas.<sup>15</sup>

Begitu pula saat penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 177/Pid.Sus/2012/PN.SGT, hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sehingga dalam kasus ini terdakwa tetap bebas. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebab keterangan saksi korban selain berdiri sendiri dan diragukan kebenarannya, juga tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi korban tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 4.

Selanjutnya putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa bernama Agus Alim yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Puput Putri Wahyuni Nur Fitriarningsih yang masih berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kejadian bermula saat terdakwa yang sedang bekerja menaikkan pasir kedalam truk telah dihubungi oleh saksi Eko untuk membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras, terdakwa menyerahkannya kepada saksi Eko yang saat itu sedang bersama korban yang sedang duduk duduk di bawah pohon tanah lapang Perumahan Graha Taman Nirwana.<sup>17</sup>

Ketiganya minum bersama, akibat minuman tersebut, korban merasakan pusing kemudian terdakwa menyandarkan kepalanya ke bahu kanan saksi Eko lalu terdakwa duduk disamping korban dengan memegang payudara korban dan memasukkan jari tangannya pada kemaluan korban yang sedang tak sadarkan diri. Setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi Eko menuju kantor. Melihat perbuatan terdakwa, saksi Eko menjadi terangsang kemudian menyetubuhi korban pada saat terdakwa sudah tidak berada dilokasi. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali kelokasi dengan maksud ingin mnyetubuhi korban namun tidak jadi karena korban sedang tidak sadarkan diri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2015, hlm. 2.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 2.

Terdakwa diancam Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebelum perubahan atau diancam pidana sesuai Pasal 290 KUHP. Putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 217/Pid.Sus/2013/PN.smg. menyatakan bahwa terdakwa Agus Alim tidak terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebelum perubahan atau dakwaan alternatif kedua Pasal 290 KUHP sehingga putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara tersebut yaitu salah satunya terkait dengan alat bukti saksi, tidak satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengetahui sendiri atau mengalami sendiri terdakwa melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2015 keduanya adalah sama mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu pencabulan terhadap anak. Kedua putusan tersebut memutus terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa bebas. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang juga masih anak dalam kedua perkara tersebut dianggap bersdiri sendiri, diragukan kebenarannya dan tidak ada saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 4.

Perlu dicermati bahwa, dalam tindak pidana pencabulan, maka yang ada pada saat terjadinya tindak pidana hanyalah pelaku dan korban, tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui sedang terjadi tindak pidana tersebut, jika ada orang lain yang mengetahui sudah pasti tindak pidana itu akan terhenti. Maka menurut penulis, hakim juga harus mempertimbangkan hal semacam ini walaupun saksi yang ada dalam perkara tersebut masih anak, namun anak saksi dalam hal ini berarti mereka merupakan orang yang mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi kepadanya.

Berkaca dari kasus tindak pidana yang melibatkan anak, maka dianggap perlu untuk mempunyai peraturan yang secara khusus mengatur mengenai peradilan anak dan sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi. Dibuatnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang mengatur mengenai peradilan anak, secara khusus telah mengatur juga mengenai anak saksi didalamnya. Namun mengenai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh anak saksi masih belum diatur dalam undang – undang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengetahui terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh anak saksi terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana dipersidangan, demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh



Majelis Hakim dalam suatu perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak dihadapan pengadilan, maka penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN**” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011).

Sebelumnya mengenai keterangan anak saksi sudah pernah diteliti, namun dalam hal ini penulis akan menyajikan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penulis yang terdahulu, yaitu sebagai berikut :

**TABEL I**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2012	Septiani Herlinda (Univrsitas Indonesia)	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan  (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.1668 K/Pid.Sus/2010)	1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi korban dibawah umur dan menderita gangguan mental apabila tidak ada saksi lain yang mendengar, mengalami dan melihat sendiri suatu peristiwa pidana ? 2. Bagaimana realitas penanganan korban tindak pidana ausila dan perlindungan saksi korban anak dilihat dari perspektif gender	Dasar pembeda atau yang menjadi pembaharu dalam penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu : 1. Judul peneliti yaitu “Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan” (Studi PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011)

				<p>(Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)?</p> <p>3. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses peradilan pidana terkait dengan permasalahan korban anak pada tindak pidana asusila ?</p>	<p>2. Rumusan masalah penulis yaitu :</p> <p>(1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti ?</p> <p>(2) Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 telah memberikan perlindungan hukum kepada anak saksi/korban dalam sistem peradilan pidana ?</p> <p>3. Mengenai jenis tindak pidana, penulis terdahulu mengkaji tentang tindak pidana asusila, Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan pada setiap tindak pidana secara lebih umum, jadi tidak terbatas hanya suatu tindak pidana saja.</p>
2	2014	Subhan Kurnia Firdhausyah (Universitas Jenderal Soedirman)	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No : 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn)	<p>1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn ?</p> <p>2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn?</p>	

## B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 telah memberikan perlindungan hukum kepada anak saksi/korban dalam sistem peradilan pidana ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami, menganalisis, menginventarisasi, dan mensistematisasi dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 mengenai .perlindungan hukum kepada anak saksi/korban dalam sistem peradilan pidana.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan hukum perlindungan anak terkait dengan

kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang awam mengenai hukum pidana yang melibatkan anak atau disebut juga anak berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

### b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini sebagai acuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dalam pemeriksaannya melibatkan seorang anak sebagai anak saksi.

### c. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan dan sebagai bahan acuan, referensi atau pedoman bagi pembuatan tugas, penelitian – penelitian lanjutan yang lebih inovatif dan solutif atau bahkan karya ilmiah lainnya.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian dan kajian penting yang berkenaan dengan keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini dibahas tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan memaparkan tentang hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan serta pertimbangan hakim dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang menganggap keterangan anak bukan sebagai alat bukti.



## BAB V : PENUTUP

Bab Penutupan ini berisi kesimpulan secara dari hasil penulisan dan saran – saran yang ditulis oleh penulis kepada pembaca.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Anak

Peraturan perundang – undangan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai anak. Hal mengenai anak diatur secara khusus karena sifat anak dan kondisi psikologisnya. Dalam keadaan tertentu memerlukan perlakuan khusus dan juga perlindungan yang khusus, terutama mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan anak dan berakibat merugikan perkembangan jasmani maupun mental anak.<sup>1</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan anak yaitu seorang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia beberapa diantaranya tidak menegaskan mengenai kriteria anak. Hanya saja terdapat beberapa pengertian anak berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Lain peraturan perundang – undangan, lain pula pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan anak. Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa belum dewasa apabila belum umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.<sup>2</sup> Pengertian anak lainnya, terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yaitu seorang yang belum berusia delapan belas tahun, anak yang masih dalam kandungan pun termasuk anak.

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 31.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 31.

Mengenai batasan umur anak merupakan hal yang penting dalam suatu perkara terlebih lagi jika perkara itu melibatkan seorang anak.<sup>3</sup> Batas usia seorang dikatakan sebagai anak, dapat dilihat dari beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang – undang yang ada di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu :

1. Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki – laki.<sup>4</sup>
2. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>5</sup>
3. Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, anak adalah “setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>6</sup>

Selain peraturan perundang – undangan diatas, UU SPPA mengatur lebih khusus mengenai klasifikasi anak yang menjadi anak saksi, yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”

Dinyatakan juga bahwa anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan / atau ia alami sendiri. Sedangkan Pasal 171 huruf a KUHAP mengatur bahwa anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangannya dalam hal pembuktian. Keterangan anak semacam ini diperoleh tanpa mengambil sumpah anak terlebih dahulu.

Perlu dicermati bahwa berdasarkan pengertian mengenai anak dan batasan usia anak yang telah diatur dalam beberapa undang – undang, menunjukkan adanya disharmoni antar peraturan yang ada.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep anak yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seorang yang belum delapan belas tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

## **B. Kajian Umum Tentang Macam – Macam Alat Bukti**

Keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang akan diambil oleh hakim. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan alat bukti

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 9.

lainnya yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan.<sup>8</sup> Sebelumnya telah sempat penulis singgung mengenai alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu terdiri dari :

#### 1. Keterangan Saksi

Pengertian saksi diatur ketentuannya dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan definisi saksi :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sehubungan dengan hal itu, selanjutnya Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur mengenai definisi dari keterangan saksi, yaitu :

“Keterangan saksi adalah salah satu dari alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan atas pengertian saksi itulah, bahwa alat bukti keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.<sup>9</sup> Mengenai saksi, berdasarkan PMK No. 65/PUU-VIII/2010 mendapat perluasan makna saksi, yaitu bukan lagi hanya orang yang telah melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana itu sendiri, tetapi juga setiap orang mengetahui mengenai peristiwa pidana yang dimaksud.

<sup>8</sup> Rusyadi, **Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana**, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 13, No 2, 2016, hlm 130.

<sup>9</sup> Syaiful Bakhri, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 110.



Pada hakikatnya, keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yang diberikan pada saat acara pemeriksaan disidang pengadilan. Tujuan dari hal ini adalah agar keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Jika terdapat keterangan saksi yang bertentangan satu dengan saksi yang lainnya, maka dapat langsung dilakukan *cross check* secara langsung.

Keterangan yang berdiri sendiri dari beberapa saksi tentang suatu kejadian, peristiwa atau mengenai keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bila keterangan saksi tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain sesuai dengan keterangan saksi lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam hal semacam ini, hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh – sungguh memerhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya.<sup>10</sup> Sehingga menjadi seorang saksi adalah suatu kewajiban hukum bagi setiap orang yang bila orang tersebut memang benar – benar mengetahui peristiwa yang terjadi mengenai suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Definisi dari keterangan ahli yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk dapat membuat terang suatu perkara pidana dalam hal guna

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hal. 100.

<sup>11</sup> Admin, **Definisi Saksi dan Korban**, 2016, Sudut Hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html>, diakses 4 September 2018.

kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berupa pendapat umum atas perkara pidana yang sedang disidangkan, atau juga yang berkaitan dengan pokok perkara.

Seorang ahli yang sedang dimintai keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan tidak diperkenankan untuk memberikan penilaian mengenai kasus yang tengah disidangkan. Maksudnya adalah, seorang ahli tidak diperbolehkan untuk memberikan penilaian salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditanyakan kepadanya. Oleh karena itulah, keterangan ahli biasanya bersifat pernyataan umum.<sup>12</sup>

### 3. Surat

Surat yang digunakan sebagai alat bukti bukan sembarang surat. Terdapat beberapa jenis surat sebagai alat bukti sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan adanya sumpah. Jenis surat yang dimaksud yaitu pertama, sesuai dengan Pasal tersebut diatas yaitu :

“berita acara dan surat lain yang dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau surat yang dibuat dihadapannya, yang didalamnya memuat keterangan mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, yang juga disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya itu.”

---

<sup>12</sup> Eddy O.S Hiariej, loc.cit.

Jenis surat kedua sebagai alat bukti yaitu surat yang dibuat menurut peraturan perundang – undangan atau juga surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian mengenai suatu hal. Jenis surat sebagai alat bukti yang ketiga yaitu surat dari keterangan seorang ahli yang didalamnya memuat pendapat dari ahli tersebut berdasarkan keahliannya tentang suatu hal atau mengenai suatu keadaan, kejadian atau peristiwa yang diminta secara resmi kepadanya. Contoh dari jenis surat ketiga ini yaitu hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter.

Selain tiga jenis surat tersebut, masih terdapat jenis surat keempat, yaitu surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain. Pada surat yang jenisnya semacam ini, hanya memiliki nilai pembuktian apabila isi dalam surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lainnya.<sup>13</sup>

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian mengenai arti petunjuk sebagai alat bukti dalam acara pemeriksaan perkara pidana. Petunjuk merupakan perbuatan kejadian atau keadaan yang karenanya memiliki persesuaian baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu tindak pidana menandakan jika telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 275.

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit. hlm 109.

## 5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terdapat pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir alasannya yaitu karena proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti lainnya.<sup>15</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus diberikan didepan sidang. Jika dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang terdakwa, maka keterangan masing – masing terdakwa tersebut berlaku untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah bahwa keterangan terdakwa satu dengan lainnya tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa yang lain. Apabila pada saat pemeriksaan alat bukti ternyata hanya terdapat alat bukti keterangan terdakwa saja, maka tidaklah cukup untuk pembuktian bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana tanpa didukung dengan alat bukti lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP juga menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang harus sekurang – kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa memang suatu tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa memang benar terdakwalah pelakunya.

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, op.cit. hlm 132.

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 265.

### C. Kajian Umum Tentang Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Pembuktian dalam perkara pidana memerlukan adanya keterangan saksi dalam acara pemeriksaannya. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Hal ini yang nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, bahwa suatu tindak pidana itu sebenarnya memang telah terjadi dan terdakwa itu telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. ini karena putusan pengadilan adalah *output* dari proses peradilan disidang pengadilan prosesnya meliputi pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti lainnya.<sup>17</sup>

Hadirnya saksi dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi harus memberikan keterangan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkan sebelum saksi memberikan keterangannya. Ada kalanya dalam suatu tindak pidana yang menjadi saksi adalah seorang anak yang mengalami dan melihatnya sendiri suatu tindak pidana, sehingga dalam pemeriksaan pada persidangan pun dibutuhkan keterangan dari anak saksi tersebut.

---

<sup>17</sup> Ronaldo Ipakit, **Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana**, Lex Crimen, Volume IV, Nomor 2, 2015, hlm 92.



Terkait dengan keterangan anak saksi, undang – undang tidak mengaturnya secara rinci. Hal ini dikarenakan seorang anak masih memiliki jiwa yang labil, yang setiap saat dapat berubah. Selain itu, seorang anak masih dianggap belum cakap hukum. Sehingga dalam hal ini anak belum diakui kapasitas legalnya. Dengan kata lain, berhubungan dengan keterangan anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>18</sup> Mengenai anak saksi Pasal 171 KUHP menyatakan bahwa :

- “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah
- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahunan belum pernah kawin;
  - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang ingatannya baik kembali.”

Berdasarkan yang telah dinyatakan dalam Pasal 171 huruf a KUHP, seorang anak dapat diperiksa untuk memberi keterangan, namun dalam hal ini anak memberikan keterangannya tanpa sumpah. Selain telah diatur dalam KUHP, khusus mengenai anak saksi diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA. Perihal anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut sebagai anak saksi adalah seprang anak yang belum 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan mengenai perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Namun dalam UU SPPA selanjutnya tidak mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti.

---

<sup>18</sup> Vallerie Moningka, **Kesaksian Anak pada TPengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 9, 2017, hlm 114.

#### D. Kajian Umum Tentang Teori Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Hal ini karena dalam pembuktian dilakukan proses pemeriksaan alat bukti sehingga dapat diperoleh fakta yang membuat jelas mengenai terjadinya tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa. dalam ilmu pengetahuan hukum mengenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu :

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*)

Bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan teori ini yaitu semata – mata ditentukan oleh keyakinan hakim saja.

2. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonce*)

Berdasarkan teori ini, keyakinan hakim mempunyai peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan yang rasional.

3. Pembuktian menurut undang – undang secara positif (*positief wettelijk*)

Berdasarkan sistem pembuktian ini, untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak adalah dengan melihat pada alat – alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang – undang.

4. Pembuktian menurut undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Pembuktian menurut undang – undang secara negatif adalah gabungan dari teori pembuktian menurut undang – undang secara positif dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.<sup>19</sup>

Berdasarkan keempat sistem pembuktian diatas, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu mengenai salah tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang – undang dan disertai juga dengan keyakinan hakim. Mengenai sistem pembuktian, terdapat empat hal fundamental terkait dengan komsep pembuktian itu sendiri, yaitu :

1. Suatu bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diproses;
2. Suatu bukti harus dapat diterima atau *admissible*;
3. Suatu bukti harus *exclusionary rules*; dan
4. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.<sup>20</sup>

Selain mengenai konsep fundamental terkait dengan pembuktian, sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat pula paling tidak 6 (enam) parameter hukum pembuktian, yaitu :

1. *Bewijstheorie*

Merupakan teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian hakim di Pengadilan. Empat teori pembuktian yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori pembuktian

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Op.cit.

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit. hlm 10.

berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, teori pembuktian positif dan teori pembuktian negatif;

2. *Bewijsmiddelen*

Merupakan alat – alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum;

3. *Bewijsvoering*

*Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat – alat bukti kepada hakim di pengadilan;

4. *Bewijslast*

*Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang – undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;

5. *Bewijskracht*

*Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan; dan

6. *Bewijs Minimum*

*Bewijs Minimum* merupakan bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 15.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menelaah bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti menelaah kemudian menganalisis bahan – bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian, sehingga akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

###### 1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan, merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang penulis teliti. Dalam menggunakan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 47.



pendekatan perundang undangan, penulis perlu memahami tata urutan atau hierarki peraturan perundang – undangan.<sup>2</sup>

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam menggunakan pendekatan kasus, penulis perlu memahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu perihal alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara.<sup>3</sup> Penulis dalam penelitian ini berdasarkan pada kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 dimana dalam putusan tersebut, hakim tidak menganggap keterangan anak saksi sebagai alat bukti.

## C. Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Normatif oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan hakim.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 137.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 159.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 181.

- a. Pasal 171 dan Pasal 185 ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ;
  - b. Pasal 1 angka 5, Pasal 58, Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
  - c. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 (2) huruf I, Pasal 59 A, Pasal 69, Pasal 76 C, dan Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606; dan
  - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Namun bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum. Bahan hukum sekunder

berguna untuk dapat memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Literatur – literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku – buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk literatur hukum maupun non hukum; dan
  - b. Artikel dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet dengan cara mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang – undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang – undangan dikaji kaidah hukumnya dari isi pasal yang terkait dengan permasalahan.

Teknik penelusuran bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan semua bahan hukum akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan maka penulis harus mencari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan karena penulis juga menggunakan pendekatan kasus, maka penulis menggunakan kasus yang relevan dengan

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 195.

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelusuran bahan hukum ini didapatkan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan studi pustaka koleksi pribadi peneliti.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis yang tujuannya adalah untuk dapat menguraikan permasalahan hukum yang terjadi, sehingga penulis mendapatkan solusi yang tepat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan yang antar fenomena secara teliti untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

Setelah penulis melakukan analisis, selanjutnya penulis akan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal untuk dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian oleh penulis.

Selain mengumpulkan lalu menganalisis bahan hukum, penulis juga melakukan metode penafsiran atau interpretasi. Interpretasi atau kata lainnya yaitu penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum. Metode ini dilakukan dalam hal peraturannya ada tapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi memberikan penjelasan terhadap teks undang – undang, agar ruang lingkup kaidah bisa ditetapkan dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Penulis menggunakan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang ada agar didapat suatu kejelasan dan kepastian dari sumber bahan hukum yang diteliti. Interpretasi yang digunakan penulis yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis mengartikan undang – undang adalah sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang – undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan antara pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang – undangan atau bisa juga dengan perundang – undangan yang lain namun masih bersangkutan, atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang – undangan sehingga bisa dimengerti apa yang dimaksud dalam suatu ketentuan tersebut.<sup>6</sup> Penafsiran sistematis yang dilakukan penulis yaitu dengan menghubungkan pengaturan mengenai anak saksi yang diatur dalam UU SPPA dengan pengaturan mengenai anak yang dapat menyatakan keterangannya dalam sidang yang diatur dalam KUHAP, yang nantinya kedua peraturan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

## **F. Definisi Konseptual**

### **a. Anak Saksi**

Anak saksi adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun yang dapat memberikan keterangannya untuk kepentingan pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.



b. Alat Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti berupa keterangan yang didapat dari seorang saksi, tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011

Penulis akan menjelaskan mengenai posisi kasus terkait dengan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa bernama Moddij H. Teurah alias Modi.
2. Terdakwa berusia 48 tahun.
3. Terdakwa dituntut Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan apabila tidak mampu membayar denda, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 181/Pid.B/2010.PN.Tdo menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
5. PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari pemohon yaitu Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon sehingga putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya yaitu terdakwa tidak terbukti bersalah, jadi terdakwa bebas.

Kronologi kasus ini bermula saat terdakwa pada 3 Februari 2010 telah melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan terhadap anak. Terdakwa adalah seorang pengasuh di Panti Tuna Rungu Damai Tomohon, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Rizaldy Goni alias Rizal yang masih berusia 8 tahun.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula saat Rizal yang merupakan penghuni panti seperti biasanya dimandikan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai pengasuh panti, namun saat korban sementara sedang dimandikan, terdakwa merasa kesal karena korban Rizal sering bergerak sehingga terdakwa marah dan kemudian mencubit lengan kiri saksi korban alias Rizal hingga membuat saksi korban Rizal kesakitan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka memar kebiruan dilengan sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm.<sup>1</sup>

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 Yang Menganggap Keterangan Anak Saksi Bukan Merupakan Alat Bukti**

Pemeriksaan dalam persidangan bertujuan untuk meneliti dan menyaring mengenai suatu tindak pidana itu benar atau tidak, bukti – bukti yang telah diajukan sah atau tidak, serta pasal yang didakwakan perumusannya telah sesuai dengan yang telah dilanggar oleh terdakwa

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.

mengenai tindak pidana yang telah terjadi itu atau tidak.<sup>2</sup> Lebih mudahnya, tujuan pemeriksaan dalam persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil.<sup>3</sup> Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar - benarnya. Dalam mencari kebenaran materiil di persidangan, terdapat proses pembuktian yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proses pembuktian sesungguhnya sudah dimulai pada saat tahap penyelidikan suatu perkara pidana. Dalam proses penyelidikan, penyidik akan mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa yang masih diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidak dilakukan penyidikan, maka sebenarnya dalam hal ini sudah ada tahap pembuktian.<sup>4</sup> Acara pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada saat persidangan yang ditentukan oleh adanya alat bukti sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 184 KUHP.<sup>5</sup> Alat bukti yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan – perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.<sup>6</sup>

Hakim adalah orang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang – undang yaitu untuk mengadili suatu perkara. Dalam melakukan kewenangannya tersebut, hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu ia melakukan rangkaian proses tindakan hukum berupa menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Saat memeriksa perkara pidana, seorang

---

<sup>2</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 177.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 65.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.66.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, . loc.cit.

hakim memiliki tugas yang berat karena hakim diharuskan untuk dapat memutus dengan adil mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu dan tidak mungkin bisa diulang lagi sehingga agar hakim dapat memutus suatu perkara, maka dilakukanlah proses pembuktian saat sidang untuk membuktikan kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana. Saat acara pembuktian nantinya akan diperoleh alat – alat bukti yang akan mendukung kebenaran mengenai perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut.

Seorang hakim juga harus bertanggung jawab atas putusan yang ia buat mengenai suatu perkara sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara ia harus benar – benar mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>7</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara juga berdasarkan atas pertimbangannya. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011 yang hasil putusan akhirnya adalah terdakwa tetap tidak bersalah sehingga terdakwa tetap dibebaskan, adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon yaitu Jaksa/Penuntut Umum, Jaksa/Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 181/Pid.B/2010.PN.Tdo yang membebaskan terdakwa adalah pembebasan tidak murni. Karena pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan tentang dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.



2. Bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan penganiayaan pencubitan kepada saksi korban Rizal, karena disamping terdakwa tidak mengakui, kejadian itu hanyalah pengakuan saksi korban Rizal saja yang tidak didukung dengan alat bukti lain termasuk alat bukti petunjuk, sehingga keterangannya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya keterangan saksi korban Rizal ini harus dikesampingkan;
3. Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Tondano telah melampaui batas kewenangannya, sehingga permohonan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan
4. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan termohon kasasi/terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.<sup>8</sup>

Menurut analisis penulis, dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang merupakan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh pemohon yaitu Jaksa/Penuntut Umum atas putusan sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 181/Pid.B/2010.PN.Tdo, hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan tersebut yang mengakibatkan terdakwa tetap dibebaskan dan dalam pertimbangan hukumnya terlebih lagi mengenai

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.

keterangan anak saksi yang dikesampingkannya, menurut analisis penulis hakim juga kurang memerhatikan tentang adanya alat bukti lain sehingga jika hakim lebih cermat mengenai keberadaan alat bukti lainnya keterangan yang diberikan oleh anak dapat menambah keyakinan hakim, dan menurut penulis hakim juga kurang memerhatikan alasan permohonan kasasi yang telah diuraikan oleh pemohon kasasi yaitu Jaksa/ Penuntut Umum.

Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi telah menguraikan alasan permohonan kasasi yang diajukannya. Alasan permohonan kasasi tersebut telah dijelaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan otomatis jika terbukti bersalah maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur rumusan pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak sebelum perubahan. Rumusan Pasal tersebut yaitu :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Unsur – unsur tindak pidana yaitu meliputi perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup> Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, penulis uraikan unsur – unsur pasal yang meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif, menjadi :

---

<sup>9</sup> Masruchin Rubai, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hlm. 22.

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif yaitu meliputi orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Kesalahan terdiri dari kesengajaan atau *dolus* dan kelalaian atau *culpa*.<sup>10</sup> Maka dalam hal ini unsur subyektif Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah setiap orang. Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan pasal tersebut.

b. Unsur obyektif

Unsur obyektif yaitu meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatan tersebut, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, maka dalam hal ini unsur obyektif Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”, dan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penganiayaan terhadap anak. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka memar kebiruan dilengan sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan alasan pemohon kasasi yaitu Jaksa/Penuntut Umum bahwa perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya telah terbukti karena telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Selain itu juga alasan pemohon kasasi mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Op.cit. hlm. 91.

adalah berdasarkan karena sebelumnya dalam persidangan telah ada setidaknya 2 (dua) alat bukti sah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan sekurang – kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Alat bukti yang ada saat pemeriksaan persidangan adalah Surat *Visum Et Repertum* No. 56/RM/VER/2010, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. F. Kasenda selaku dokter rumah sakit Bathesda Tomohon yang berisi keterangan hasil pemeriksaan luka korban. Berdasarkan *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa luka memar kebiruan dilengan kiri Rizal sedalam 2 cm (dua sentimeter) adalah akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup> *Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat, hal ini adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 187 huruf a dan huruf c KUHAP, yang secara berturut - turut menyatakan bahwa :

- “a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.”

Sesuai dengan rumusan pasal diatas mengenai ketentuan surat, maka *Visum Et Repertum* adalah surat yang dibuat dokter dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan peraturan perundang – undangan sehingga *Visum Et Repertum* masuk dalam katagori surat yang memiliki nilai pembuktian dalam

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011

persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Selain alat bukti surat, ada pula alat bukti keterangan saksi. Saat proses pembuktian terdapat 5 (lima) orang saksi yang saat itu diajukan oleh Penuntut Umum yang jika dirinci lagi kelima saksi tersebut terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang anak saksi yang dalam memberikan keterangannya ia tidak disumpah. Dalam kasus ini anak saksi juga sekaligus sebagai korban.

Empat orang saksi yang keterangan kesaksiannya diberikan dibawah sumpah adalah teman – teman korban Rizky dipanti tersebut yaitu saksi Novita Mintalangi alias Vita, saksi Oli Poluan alias Oli, saksi Ellen P. Kojongian alias Ellen, dan saksi Maria Kawilarang. Keempatnya mengetahui perbuatan terdakwa karena korbanlah yang menceritakannya.<sup>12</sup> Walaupun keterangan yang mereka berikan adalah bukan berdasarkan atas apa yang telah dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dan dialaminya sendiri, namun dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tondano pada putusan sebelumnya menyatakan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu* yang nilai pembuktiannya hanya bernilai sebagai petunjuk. Pengertian petunjuk sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011.



Berbeda pengertian petunjuk berdasarkan ketentuan KUHAP, pengertian petunjuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) adalah sesuatu yang dapat berupa tanda atau isyarat untuk menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya. Petunjuk menurut KBBI juga diartikan sebagai suatu ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan mengenai sesuatu yang harus dilakukan dengan kata lain dalam hal ini petunjuk adalah sebagai suatu nasihat.<sup>13</sup> Dalam hal mencari dan menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus berhati – hati. Petunjuk sebaiknya digunakan apabila sudah dalam keadaan yang mendesak. Sebelum itu hakim harus memeriksa dan menggunakan alat bukti yang lain dahulu, baru jika dirasa telah memeriksa alat bukti dan belum juga mendapatkan keyakinan atas perkara yang diperiksanya, hakim dapat mencari alat bukti petunjuk yang bias didapatkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Mengenai keterangan anak saksi/korban Rizky yang pada saat itu berusia 8 (delapan) tahun, ternyata dalam pertimbangannya hakim mengesampingkan keterangan anak saksi ini. Padahal menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya harus melihat pula bahwa walaupun keterangan tersebut diberikan oleh anak yang pada saat memberikan keterangan ia tidak disumpah sebelumnya, namun ternyata keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan juga saling berkaitan dengan alat bukti yang lain, maka keterangannya dianggap dan memiliki nilai sebagai alat

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 1506.

bukti yang sah, sehingga termasuk sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Perlu dicermati bahwa, agar alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka ada syarat - syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah harus mengenai apa yang seorang saksi tersebut alami sendiri, dengar sendiri, dan lihat sendiri.
- b. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bahwa seorang yang akan memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah bahwa orang tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- c. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1), keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti jika dinyatakan dalam sidang pengadilan.
- d. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2), yaitu keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk dapat membuktikan terdakwa bersalah sehingga agar mempunyai kekuatan pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti yang lain.
- e. Berdasarkan Pasal 185 ayat (4), yaitu keterangan dari beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saksi

tersebut berhubungan antar satu dengan yang lainnya sehingga dapat membenarkan bahwa telah terjadi suatu kejadian tertentu.<sup>14</sup>

Menurut penulis, hal yang paling penting dalam keterangan saksi yaitu mengenai sumpah yang harus diucapkan oleh seorang saksi sebelum ia memberikan keterangannya. Hal ini karena dengan adanya sumpah yang saksi ucapkan sebelum ia memberikan keterangan kesaksiannya, akan menguatkan keterangan yang ia berikan dalam persidangan bahwa memang keterangan yang diberikannya adalah benar.<sup>15</sup> Walaupun adanya keterangan saksi saja tidak dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Namun keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pada hukum acara pidana.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak adalah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap saat proses pembuktian di Pengadilan. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pembuktian pembuktian negatif seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya. Menganut sistem pembuktian negatif yaitu mengenai salah tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang – undang dan disertai juga dengan keyakinan hakim. Selain itu, mengenai pembuktian, terdapat empat hal fundamental terkait dengan konsep pembuktian itu sendiri, yaitu :

1. Suatu bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diproses;
2. Suatu bukti harus dapat diterima atau *admissible*;

---

<sup>14</sup> Adella Fajria, **Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan**, JOM Fakultas Hukum, Volume 4, No 2, 2017, hlm 7.

<sup>15</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 222.

3. Suatu bukti harus *exclusionary rules*; dan
4. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.<sup>16</sup>

Empat hal fundamental mengenai konsep pembuktian tersebut penulis analisis berdasarkan kasus tentang adanya anak saksi dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011. Pertama, suatu bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diproses. Hal ini artinya adalah bukti yang ada saat proses pembuktian tersebut harus memiliki keterkaitan dengan fakta – fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa.<sup>17</sup> Dalam perkara tersebut, dinyatakan bahwa saat proses pembuktian terdapat setidaknya 3 alat bukti yaitu adanya keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Masing masing alat bukti yang ada juga memiliki keterkaitan dengan fakta yang dapat menunjukkan pada kebenaran suatu peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi menyatakan bahwa korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan *visum et rapertum* korban mendapat luka memar kebiruan sedalam 2 cm dilengan korban. Sehingga dalam hal ini bukti yang ada saat itu jelas relevan dengan perkara yang sedang diproses.

Kedua, suatu bukti harus dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya berarti bukti tersebut relevan dengan perkara yang sedang diproses.<sup>18</sup> Dinyatakan bahwa dalam perkara tersebut, tidak diakuinya keterangan anak saksi yang oleh hakim dianggap

---

<sup>16</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit. hlm 10-12.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 10.

sebagai *Testimonium de auditu* sehingga keterangannya dikesampingkan, menurut penulis ini merupakan hal yang sangat tidak beralasan. Diketahui bahwa sebelumnya telah ada PMK No. 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya memperluas makna saksi sehingga yang dimaksud saksi adalah setiap orang yang mengetahui mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Adanya saksi anak dalam perkara tersebut, sudah seharusnya hakim dapat mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh anak, karena dalam hal ini anak merupakan seorang yang sekaligus menjadi korban, berarti ia mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konsep yang kedua ini dapat diterimanya suatu bukti adalah didasari atas pertimbangan hakim. Namun perlu dicermati lagi karena Indonesia bukan lah menganut sistem pembuktian yang hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, namun juga pembuktian berdasarkan undang – undang.

Ketiga, suatu bukti harus *exclusionary rules*. Maksud dari konsep ini adalah tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, peraturan mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara illegal tidak dapat diterima di pengadilan.<sup>19</sup> Dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya alat bukti yang diperoleh dengan melawan hukum. Alat bukti yang diajukan saat persidangan adalah alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 11.



Keempat, suatu bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konsep ini, hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, lalu akan menjadikan bukti – bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.<sup>20</sup> Mengenai konsep keempat ini, erat kaitannya dengan konsep pertama. Konsep keempat ini, menekankan pada adanya kesesuaian antar bukti yang satu dengan bukti lainnya sehingga dapat diperoleh keyakinan hakim untuk dapat memutus suatu perkara. Mengenai alat bukti dalam perkara ini, memiliki kesesuaian antar satu dengan yang lainnya sehingga memperjelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban. Lantas hal yang seperti apa lagi yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutus terdakwa bebas.

Selain empat hal fundamental yang terkait dengan pembuktian tersebut diatas, penulis juga menganalisis PMA No. 1469 K /Pid.Sus/2011 berdasarkan parameter pembuktian. *Bewijstheorie*, merupakan teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian hakim di Pengadilan.<sup>21</sup> Empat teori pembuktian yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, teori pembuktian positif dan teori pembuktian negatif.

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 12.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 15.

Indonesia menganut teori pembuktian negatif yaitu berdasarkan undang – undang dan keyakinan hakim. Dalam putusan tersebut, mengenai alat bukti yang ada adalah sudah sesuai derdasarkan undang – undang namun tetap alat bukti yang sesuai saja tidak cukup untuk dapat membuktikan bersalahnya terdakwa jika tidak disertai dengan keyakinan hakim. Hakim yang memutus perkara tersebut memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa bebas. Sedangkan menurut penulis, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas terbukti. Hakim seharusnya bisa lebih cermat dalam memberikan pertimbangan alat bukti di persidangan.

Parameter *Bewijsmiddelen*, merupakan alat – alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.<sup>22</sup> Dalam PMA No. 1469 K /Pid.Sus/2011 terdapat beberapa alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Sudah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Parameter selanjutnya yaitu *Bewijsvoering*. *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat – alat bukti kepada hakim di pengadilan. *Bewijsvoering* ini menitikberatkan pada hal – hal yang bersifat formalitas.<sup>23</sup> Parameter ini lebih banyak digunakan dalam ketentuan

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 20.

KUHAP, yang mana mewajibkan dalam mencari alat bukti tidak boleh melawan hukum.<sup>24</sup> Seperti yang telah penulis uraikan, dalam putusan tersebut alat bukti yang diajukan saat persidangan adalah alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

*Bewijslast* atau *burden of proof* adalah parameter pembuktian mengenai pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang – undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.<sup>25</sup> Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum.<sup>26</sup> Berdasarkan atas parameter ini, PMA No. 1469 K /Pid.Sus/2011, mengenai beban pembuktiannya adalah dibebankan pada penuntut umum. Dijelaskan pula dalam putusan tersebut bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti pada persidangan saat proses pembuktian.

*Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Dalam hukum acara pidana, kekuatan pembuktian semua alat bukti pada hakikatnya adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Danang Averroes Al-Khawarizmi, Parameter Pembuktian, <http://www.negarahukum.com/hukum/parameter-pembuktian.html>, diakses pada 17 Desember 2018, pukul 14.30 WIB.

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit. hlm. 22.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 23.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 25.

Parameter *bewijskracht* ini jika dikaitkan dengan adanya alat bukti dalam PMA No. 1469 K /Pid.Sus/2011 maka menulis dapat menyatakan bahwa ketiga alat bukti yang terdapat dan telah diperiksa dalam perkara tersebut semuanya memiliki kekuatan pembuktian. Keterangan saksi yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, yaitu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui mengenai terjadinya tindak pidana, keterangan saksi dinyatakan dalam persidangan, saksi telah disumpah sebelumnya, memiliki kesesuaian antar saksi, dan terdapat lebih dari seorang saksi, karena adanya *unus testis nullus testis*.

Selain itu, mengenai surat pun telah sesuai dengan ketentuan sebagai alat bukti surat, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau seorang saksi mengenai tindak pidana yang terjadi, dan alat bukti keterangan anak saksi sebagai petunjuk, yang memiliki persesuaian dengan saksi lainnya yang disumpah serta kesesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa.

*Bewijs Minimum* merupakan bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Konsep dalam hukum acara pidana dalam menentukan kesalahan terdakwa paling tidak harus ada 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.<sup>28</sup> berdasarkan parameter ini, dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti.

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 26.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kasus tentang adanya anak saksi dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 yang penulis kaitkan dengan konsep pembuktian dan juga parameter pembuktian. Menurut penulis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penulis tidak menemukan celah yang tepat yang menjadikan penulis menyatakan bahwa putusan tersebut adalah sudah tepat. Dari sisi alat bukti yang ada, telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, selain itu juga masing – masing alat bukti yang ada juga memiliki kesesuaian sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang tepat dan sangat tidak beralasan jika hakim memutus terdakwa tidak bersalah dan terdakwa bebas.

Keterangan saksi yang diberikan oleh seorang yang telah dewasa dan telah memenuhi persyaratan agar dapat memberikan keterangannya sebagai saksi dalam hal ini tidaklah menjadi masalah, karena orang yang telah dewasa dianggap telah cakap hukum dan mampu bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan termasuk dalam memberikan keterangan di pengadilan yang digunakan untuk pembuktian suatu perkara. Namun, yang menjadi suatu permasalahan yaitu bila keterangan saksi diberikan oleh seorang anak.

Tidak mudah menjadikan seorang anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana. Hal ini disebabkan karena anak jiwanya masih labil, sehingga pemikirannyapun masih sering berubah – ubah, dikhawatirkan saat seorang anak memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengenai suatu perkara, keterangan yang ia berikan akan berubah ubah sehingga menimbulkan kebingungan oleh hakim yang akan memutus perkara.



Pasal 171 KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi yang diberikan oleh anak dan tidak disumpah dulu sebelumnya. Pasal 171 huruf a KUHAP menyatakan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, dapat didengar keterangannya sebagai saksi tanpa harus disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi yang diberikan oleh anak seperti ini bukan merupakan alat bukti yang sah, karena telah jelas bahwa seorang anak dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, maka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang sebelumnya ia telah disumpah dan saksi yang tidak disumpah tentu berbeda. Keterangan saksi yang dalam hal ini adalah anak saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, terdapat penjelasan terhadap Pasal 171 KUHAP yaitu dalam hal keterangan saksi sebagaimana ditentukan Pasal 171 KUHAP maka keterangan saksi dijadikan sebagai petunjuk. Maka dalam hal keterangan saksi yang diberikan oleh anak tanpa disumpah keterangannya dijadikan sebagai petunjuk.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai pengertian petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan KBBI, pada umumnya alat bukti petunjuk baru diperlukan jika alat bukti yang lainnya belum memenuhi batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti petunjuk, baru dapat dicari bila telah ada alat bukti

yang lain. Pemeriksaan pada saat sidang di pengadilan tindak mungkin langsung mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk sebelum memeriksa alat bukti yang lain.

Tanpa adanya alat bukti petunjuk, pemeriksaan pada saat persidangan di pengadilan mungkin saja tetap dapat mencapai pembuktian yang cukup, namun petunjuk saja tidak akan mampu memenuhi atau mencukupi nilai pembuktian jika alat bukti yang lain tidak ada. Ini berarti, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena terikat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, agar alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus juga disertai dengan adanya satu alat bukti lain.<sup>29</sup>

Mengenai keterangan anak saksi yang sebagai petunjuk maka tetap masih harus memperhatikan syarat lainnya agar alat bukti keterangan anak saksi ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Salah satunya yaitu keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sehingga harus ada alat bukti lain yang mengiringi.

Selanjutnya, dikuatkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang lebih memberikan kepastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti, yang pada intinya pasal ini mengatur bahwa walaupun anak pada saat memberikan keterangannya tidak disumpah

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 317.

terlebih dahulu, namun keterangan anak tersebut sesuai jika dihubungkan dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah dan memiliki kesesuaian sehingga membangun adanya suatu rangkaian peristiwa atau kejadian tindak pidana yang sedang diperiksa maka akan dapat memengaruhi pemikiran dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana yang sedang diperiksanya, sehingga dalam hal ini kekuatan pembuktian keterangan anak saksi adalah sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan atas analisis penulis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa seharusnya keterangan saksi dalam perkara tersebut dapat diakui atau dianggap sebagai alat bukti yang sah. Dijelaskan dalam putusan bahwa 4 (empat) orang saksi lainnya yang merupakan teman korban, walaupun dalam memberikan keterangannya mereka tidak berdasarkan atas apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, namun setelah adanya PMK No. 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna saksi, bahwa yang disebut saksi adalah bukan lagi hanya orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang dapat memberikan kesaksiannya yang mengetahui mengenai perkara yang bersangkutan yang diketahuinya termasuk juga saksi *testimonium de auditu*. Maka keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang merupakan teman korban adalah alat bukti yang sah, yang termasuk dalam jenis alat bukti keterangan saksi.

Selain itu, mengenai keterangan anak saksi dan sekaligus anak korban dalam perkara ini, menurut penulis keterangan anak saksi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah yaitu petunjuk. Walaupun anak dalam memberikan keterangan kesaksiannya tidak disumpah, namun ia merupakan orang yang bahkan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepadanya sehingga anak disini merupakan seorang saksi yang memberikan keterangan untuk kepentingan pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pidana yang saat itu ia alami sendiri.

Keterangan anak saksi dianggap dan memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu petunjuk hal ini karena keterangan anak saksi mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang disumpah, selain itu juga terdapat alat bukti lainnya berupa surat. Bukan itu saja, keterangan anak saksi sebagai petunjuk dianggap sebagai keterangan yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Mengenai PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 menurut penulis hakim kurang tepat dalam memutus perkara. Hal ini karena telah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi dan juga terdapat alat bukti lainnya berupa *Visum Et Repertum* yang merupakan alat bukti surat. Selain itu juga adanya keterangan anak saksi yang dapat digunakan sebagai petunjuk karena keterangannya yang bisa memperkuat keyakinan hakim. Walaupun penulis juga mengetahui, bahwa seorang hakim juga memiliki kebebasan

untuk memutus suatu perkara berdasarkan atas keyakinannya. Terkait dengan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, dapat diartikan bahwa hakim bebas memeriksa dan memutus suatu perkara menurut keyakinannya dan tanpa ada pengaruh atau ikut campur dari pihak manapun.<sup>30</sup> Namun menurut penulis, mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara, sudah seharusnya hakim juga harus tetap memerhatikan alat bukti yang ada saat proses pembuktian di pengadilan.

Terkait dengan anak saksi, berarti dalam hal ini seorang anak terlibat dalam proses peradilan pidana. UU SPPA secara khusus mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Lahirnya undang – undang ini memberikan solusi baru dalam rumusan – rumusan pasalnya untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan anak, yaitu dalam hal anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak saksi tindak pidana, dan anak sebagai sebagai korban dalam tindak pidana. Penulis khususnya, yang mana dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, UU SPPA ternyata belum mengaturnya.

UU SPPA ini lebih mengatur mengenai hak – hak anak saksi saat ia memberikan keterangannya, yang diatur dalam beberapa pasal. Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU SPPA mengatur mengenai pengertian dari anak saksi. Pasal 1 angka 5 UU SPPA dalam ketentuannya menyatakan :

---

<sup>30</sup> Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 168.



“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”

Selain itu, juga dinyatakan bahwa anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan / atau ia alami sendiri. Selanjutnya, dalam Pasal 58 UU SPPA, mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemeriksaan anak saksi dalam persidangan.

Pasal 58 UU SPPA menyatakan bahwa :

- “(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/Anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban Dan/Atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban Dan/Atau Anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya :
  - b. diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lainnya.”

Selain dua pasal diatas, undang – undang ini juga mengatur secara lebih rinci dalam bab tersendiri mengenai Anak Korban dan Anak Saksi, yaitu dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 UU SPPA. Pada intinya bab pengaturan mengenai Anak Korban dan Anak Saksi ini mengatur mengenai perlindungan dan hak – hak anak korban dan anak saksi.

Pasal 89 UU SPPA mengatur mengenai anak korban dan /atau anak saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 89 UU SPPA menyatakan :

“anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Lalu, diatur pula secara rinci mengenai hak – hak anak korban dan anak saksi, seperti adanya upaya rehabilitasi bagi anak, anak juga memperoleh jaminan keselamatan fisik maupun mentalnya. Hal ini secara jelas ketentuannya diatur dalam Pasal 90 UU SPPA yaitu :

- “(1) selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :
- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Selanjutnya dalam Pasal 91 UU SPPA masih memiliki keterkaitan dengan dua pasal sebelumnya. Pasal 91 UU SPPA lebih menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan jika terjadi suatu hal kepada anak. Misalnya jika anak yang menjadi korban dan perlu untuk mendapatkan tindakan pertolongan segera maka anak dapat dirujuk ke Rumah sakit. Hal – hal semacam ini yang diatur dalam Pasal 91 UU SPPA yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- “(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat menunjuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Setelah penulis membaca dan menganalisis peraturan mengenai anak saksi dalam UU SPPA, ternyata UU SPPA tidak mengatur mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan yang diberikan oleh anak saksi, sehingga menurut pendapat penulis dalam hal terjadi suatu perkara yang melibatkan anak dalam proses pembuktiannya dimana anak ini adalah sebagai seorang saksi, seperti yang terjadi pada PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, maka kekuatan pembuktian keterangan anak saksi sebagai alat bukti mengacu pada pada peraturan yang lebih umum yaitu KUHAP.

Keterangan anak saksi diakui sebagai alat bukti yang sah, dengan ketentuan bahwa harus terdapat persesuaian, baik antara keterangan anak saksi yang tidak disumpah dengan keterangan saksi lainnya yg disumpah dan juga dengan tindak pidana itu sendiri hingga jelas dapat menggambarkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Selain harus ada persesuaian, agar keterangan anak saksi memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk harus ada alat bukti lain. Petunjuk sebagai alat bukti dapat diperoleh dari alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jika keduanya telah terpenuhi, maka dalam hal ini keterangan anak saksi memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, yaitu petunjuk.

### **C. Perlindungan Hukum Kepada Anak Saksi/Korban Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011**

Undang – Undang Perlindungan Anak mengatur secara tegas bahwa anak harus dilindungi. Dalam undang – undang ini juga mengatur mengenai hak – hak anak yang harus dilindungi. Selain itu juga mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang diatur dalam beberapa pasal. Beberapa pasal tersebut diawali dengan pengertian anak dan pengertian perlindungan anak yang secara berturut – turut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yaitu seorang yang belum berusia delapan belas tahun, anak yang masih dalam kandungan pun termasuk anak. Selanjutnya pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peraturan mengenai perlindungan anak dan hak – hak anak yang harus dilindungi, penulis mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 59 A, Pasal 69, Pasal 76 C dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Pasal – Pasal tersebut, secara berturut – turut menyatakan bahwa:

Pasal 59 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban Negara serta pemerintah dalam melindungi anak. dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak diatur secara spesifik bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak adalah dalam bentuk perlindungan khusus yang akan diberikan jika anak mengalami suatu kondisi misalnya saja anak yang sedang dalam situasi darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan lainnya yang lebih lengkapnya Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan :

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.



- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- Anak dalam situasi darurat;
  - Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - Anak yang menjadi korban pornografi;
  - Anak dengan HIV/AIDS;
  - Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - Anak korban kejahatan seksual;
  - Anak korban jaringan terorisme;
  - Anak penyandang disabilitas;
  - Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pemberian perlindungan khusus kepada anak yang diatur Pasal 59 UU Perlindungan Anak, selanjutnya mengenai ketentuan tentang bentuk dari perlindungan khusus itu sendiri yang dibelikan kepada anak diatur dalam Pasal 59 A UU Perlindungan Anak menyatakan :

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 69 UU Perlindungan Anak secara lebih khusus lagi memberikan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan baik itu fisik maupun psikis, yaitu :

“Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan fisik dan /atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Terdapat larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 76 C UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”

Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal diatas, telah ditentukan pula mengenai aturan pidananya yakni yang diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan :

- “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak RP 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP 300.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 mengenai adanya anak saksi dalam proses pembuktian tindak pidana yang digunakan oleh penulis merupakan putusan sebelum adanya perubahan atas UU Perlindungan Anak sebelum perubahan. Walaupun pada saat terjadinya perkara tersebut hingga melahirkan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, dalam UU Perlindungan Anak sebelum perubahanpun mengatur mengenai hak – hak anak. Pasal 60 menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada salah satunya anak korban kekerasan, baik kekerasan fisik dan/atau mental.”

Selanjutnya, Pasal 69 mengatur bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan dilakukan dengan beberapa upaya, salah satunya yaitu dengan melakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan kepada Anak. Mengenai ketentuan pidana dan ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 80.<sup>31</sup>

Mengenai apa yang telah terjadi kepada anak saksi pada waktu itu jika dilihat berdasarkan UU Perlindungan Anak sebelum perubahan, menurut penulis dalam hal ini anak juga tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 80 yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Jangankan mendapatkan haknya sebagai anak korban dan juga sekaligus anak saksi, dengan putusan hakim yang

---

<sup>31</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2435.

membebaskan terdakwa saja maka menurut penulis ini juga telah tidak memberikan perlindungan kepada anak tersebut.

Berdasarkan atas apa yang telah diatur dalam ketentuan ketentuan pasal tersebut, menurut penulis jika dikaitkan dengan PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 maka putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum pada anak saksi/korban. Penulis beranggapan bahwa hakim bahkan mengabaikan ketentuan mengenai perlindungan anak terlebih lagi berkaitan dengan hak – hak anak yang telah secara jelas diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dengan hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, padahal menurut penulis, berdasarkan keterangan fakta yang telah terjadi saat proses persidangan yaitu dengan telah tercukupinya minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana yg telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, seorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah ia lakukan dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang ia langgar.

Namun dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, hakim mengesampingkan keterangan anak saksi karena keterangan anak saksi dianggap sebagai *testimonium de auditu* selain itu juga hakim menganggap anak masih dibawah umur dan atas dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa bebas.<sup>32</sup> Dengan bebasnya terdakwa, menimbulkan rasa tidak adil pada anak saksi yang juga sekaligus korban pada perkara tersebut. Hal ini berarti putusan itu juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan hanya mengenai hak asasi manusia yang dalam

---

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011

hal ini merupakan hak anak tetapi juga mengenai masalah penegakan hukumnya terlebih khusus lagi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak kekerasan.<sup>33</sup>

Selain itu, ternyata putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, yaitu meliputi :

a. Non diskriminasi;

Yang dimaksud asas Non diskriminasi yaitu dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah dengan tidak memandang etnis, suku, ras, agama, keadaan ekonomi, jenis kelamin, keluarga, bahasa dan perbedaan-perbedaan lainnya.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Maksud dari asas ini adalah dalam semua tindakan yaitu yang menyangkut anak, maka pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak oleh karena itu hal ini harus menjadi hal yang diutamakan.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Maksud dari asas ini adalah hak anak untuk hidup, melangsungkan hidup dan mengembangkannya yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan tentunya oleh orang tua.

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom, op.cit. hlm. 13.



d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Maksud dan arti dari asas ini adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan dapat turut serta menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika berkaitan dengan hal – hal yang memengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan asas – asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak dan dapat dikatakan juga telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Hal ini karena menurut penulis, terkait dengan asas non diskriminasi dan asas penghargaan terhadap pendapat anak, terjadi diskriminasi oleh hakim. Hakim juga tidak memberikan penghargaan atas pendapat anak karena pada saat proses pembuktian keterangan anak saksi dikesampingkan oleh hakim karena anak saksi yang dianggapnya masih belum cukup umur padahal asas non diskriminasi ini berlaku pada setiap manusia tak terkecuali anak.

Selain itu juga mengenai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, seharusnya hakim lebih memperhatikan lagi adanya asas ini, bahwa kepentingan terbaik bagi anak sudah seharusnya menjadi hal yang diutamakan. Saat itu, kepentingan terbaik yang berhubungan dengan anak saksi/korban adalah tidak seharusnya terdakwa tetap bebas, mengingat kembali telah terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan, namun ternyata hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah.

Hal semacam ini dapat memengaruhi kepentingan anak terkait dengan masa depan anak tersebut. Rizal sebagai anak saksi dan juga sebagai anak korban dalam perkara itu, dikhawatirkan mengalami trauma atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuhnya di panti tempat ia tinggal. Tempat tinggal seharusnya dapat menjadi tempat yang dianggap aman dan dapat memberikan perlindungan bagi penghuninya bukan malah memberikan perasaan takut atau bahkan trauma. Dikhawatirkan juga, terdakwa sebagai pengasuh yang mendapatkan putusan bebas dalam perkara tersebut dapat mengulang kembali perbuatan kekerasan yang pernah ia lakukan sehingga dapat menimbulkan kasus serupa atau bahkan dapat berdampak lebih parah dari kasus sebelumnya.

Terkait dengan upaya hukum, seseorang dapat mengajukan upaya hukum biasa yang meliputi banding maupun kasasi mengenai suatu perkara yang ia merasa tidak puas akan putusan hakim pada tingkat pengadilan sebelumnya. Jika dirasa masih belum puas dengan putusan hakim pada tingkat peradilan sebelumnya, maka masih juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Sama halnya juga mengenai PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011. Karena putusan tersebut merupakan putusan tingkat kasasi, jika pemohon kasasi tidak puas terkait dengan putusan hakim, masih dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Syarat utama peninjauan kembali adalah adanya bukti baru atau *nouvum*. Namun diketahui bahwa PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga hal ini juga dapat diartikan bahwa tidak ada korban dalam perkara ini.

Pasca PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011, terkait dengan hal perlindungan kepada anak, tidak dijelaskan secara lebih lanjutnya seperti apa. Namun atas dasar putusan kasasi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah yang berarti tidak ada korban dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya. Sementara itu kejadian yang mengakibatkan luka memar dilengan Rizal sedalam 2 cm telah terjadi, dan mengenai upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama atau koordinasi antara panti tempat tinggal Rizal dengan lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang – undangan untuk dapat memberikan tindakan sebagai upaya yang dapat menghilangkan trauma Rizal akibat perbuatan pengasuh pantinya.

Selain itu, juga dapat dilakukan upaya perlindungan kepada Rizal diluar upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, yaitu dengan memberhentikan pengasuh tersebut untuk tidak lagi bekerja di panti. Atau dengan mengganti pengasuh panti dengan orang yang dapat mengerti dan memahami kebutuhan khusus penghuni panti tersebut. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 menganggap keterangan anak saksi bukan merupakan alat bukti sehingga keterangan anak saksi dikesampingkan oleh hakim adalah karena dianggap yang memberikan keterangan saksi adalah seorang anak yang masih dibawah umur.
2. PMA No. 1469 K/Pid.Sus/2011 tidak memberikan perlindungan hukum pada anak saksi/korban. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut juga tidak memenuhi asas penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

#### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran penulis terkait dengan hakim saat memutus suatu perkara yang melibatkan anak saksi, yaitu :

1. Sebaiknya hakim dalam menangani suatu perkara yang melibatkan anak saksi harus memperhatikan bahwa keterangan yang diberikan oleh anak saksi dapat digunakan sebagai petunjuk yang bias memperkuat keyakinannya dalam memutus suatu perkara dengan ketentuan bahwa keterangan anak saksi memiliki persesuaian mengenai peristiwa yang

telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu juga sebelumnya harus telah ada alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan anak saksi.

2. Hakim dalam memutus perkara yang juga melibatkan anak didalamnya, seharusnya tetap memperhatikan asas penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini agar anak dapat merasa dilindungi serta demi mencapai tujuan hukum yakni keadilan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Gatot Supramono, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Isrok, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012.
- Lamintang dan Theo Lamintang, **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang tentang Mahkamah Konstitusi**, Kepanitiaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Masruchin Rubai, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Malang, UM Press, 2001.
- Mokhammad Najih dan Soimin, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012.
- M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015

Redaksi Sinar Grafika, **KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Lyberty, Yogyakarta, 2008

Syaiful Bakhri, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Tongat, **Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012

Wagiati Soetedjo dan Melani, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

## JURNAL

Adella Fajria, **Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan**, JOM Fakultas Hukum, Volume 4, No 2, 2017.

Ronaldo Ipakit, **Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana**, Lex Crimen, Volume IV, Nomor 2, 2015.

Rusyadi, **Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana**, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 13, No 2, 2016.

Vallerie Moningka, **Kesaksian Anak pada TPengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 9, 2017.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

**Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

**Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

**Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

**Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

**Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419

**Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

**Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

**Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2015

## INTERNET

Admin, **Definisi Saksi dan Korban**, 2016, Sudut Hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html>, diakses 4 September 2018.

Danang Averroes Al-Khawarizmi, Parameter Pembuktian, <http://www.negarahukum.com/hukum/parameter-pembuktian.html>, diakses pada 17 Desember 2018.

